ABSTRAK

Pembatalan pengangkatan anak tidak hanya dikarenakan mengangkat seorang anak melainkan alasan pembatalan anak bisa didasarkan karena anak tidak memenuhi kewajibannya. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud seperti tidak memelihara hubungan dengan orang tua angkat. Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat perkara pembatalan pengangkatan anak. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan tugas akhir penulisan hukum dengan judul " Pembatalan Pengangkatan Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim)

Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum pembatalan pengangkatan anak pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian preskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 130/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim, undang-undang serta buku-buku dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan pengangkatan anak berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai anak angkat yaitu tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat yang keadaan kondisi kesehatan Penggugat sedang dalam masa perawatan dan pemulihan pasca

serangan penyakit stroke yang pernah diderita oleh Penggugat. Akibat hukum pembatalan anak tersebut tidak lagi mempunyai kedudukan hukum sebagai anak angkat dari orangtua angkatnya serta hapusnya hak dan kewajiban antara orang tua angkat terhadap anak angkat.

Kata kunci : *Pembatalan, Pengangkatan Angkat*

ABSTRACT

Cancellation of adoption is not only due to adopting a child but the reason for canceling a child can be based on the child not fulfilling his obligations. Such obligations include not maintaining relationships with adoptive parents. One of the Decisions of the East Jakarta District Court Number: 130 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Tim, the panel of judges granted the plaintiff's claim to cancel the appointment of a child. Researchers are interested in conducting research in order to compile the final task of writing a law with the title "Cancellation of Appointment of Children (Judicial Review of East Jakarta District Court Decision Number: 130 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Tim)

This study aims to determine the legal considerations of judges and the legal consequences of canceling the appointment of a child in East Jakarta District Court Decision Number: 130 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Tim. This study uses a legal juridical normative approach method, with prescriptive analysis research specifications. The data source used is secondary data in the form of East Jakarta District Court Decision Number: 130 / Pdt.G / 2017 / PN Jkt.Tim, the law as well as books and data analysis were carried out in a normative qualitative manner.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the judge's consideration in granting the cancellation of adoption of a child based on Article 46 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, where the defendant did not carry out his obligations as an adopted child is that the defendant did not pay attention to the Plaintiff who is in the Plaintiff's health condition is in the period of treatment and recovery after a stroke that has been suffered by the Plaintiff. As a result of the legal cancellation of the child no longer has a legal position as an adopted child of his adoptive parents and the abolition of the rights and obligations between adoptive parents to adopted children.

Keywords: Cancellation, Lift Appointment